

## Pelaksanaan Pranata Pendidikan di Sekolah Inklusi

Fauziah Sri Wahyuni<sup>1</sup>, Achmad Hufad<sup>2</sup>, Sardin Supriatna<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 40154  
E-mail : fauziahsriwahyuni@upi.edu

### ABSTRAK

Pendidikan sebagai pranata sosial memiliki komponen yang saling berkaitan. Sekolah inklusi sebagai salah satu bentuk pendidikan terpadu perlu untuk dianalisis komponennya agar diketahui optimalisasi penyelenggaraannya. Maka dalam penelitian ini dianalisis pranata pendidikan inklusi dengan mengidentifikasi pelaksanaan lima komponennya berupa tata kelakuan, fungsi sosial, aktor, perilaku berpola, dan sarana prasarana. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dengan teknik wawancara yang dienkapi observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen pranata pendidikan terlaksana pada sekolah ini. Berdasarkan hasil analisis, komponen tata kelakuan terlaksana berlandaskan pada sumber norma tertulis dan tidak tertulis tetapi belum terbentuk peraturan khusus yang mengatur perilaku di sekolah inklusi. Fungsi sosial tercermin dalam visi, misi, dan program sekolah. Pemegang peran di sekolah ini adalah pimpinan yayasan, struktural sekolah, guru pembimbing khusus, guru mata pelajaran, siswa, dan orangtua. Namun untuk tim ahli inklusi belum dimiliki sehingga pelaksanaan perannya berbasis pada pengalaman dan analisis internal. Perilaku berpola dari aktor di sekolah ini masih belum optimal dilaksanakan, maka dibutuhkan pembinaan khusus agar masing-masing aktor dapat berperan sesuai fungsinya. Sedangkan dari sarana dan prasarana masih belum optimal tersedia dan pemenuhannya dilakukan secara bertahap. Secara umum komponen tersebut terlaksana, meskipun masih dibutuhkan optimalisasi salah satunya dengan proses pendampingan terutama dari pihak dinas pendidikan.

### Kata Kunci

Pranata, pendidikan, sosial, inklusi

### 1. PENDAHULUAN

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan anak yang memiliki kelainan, sebagaimana disebutkan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa beberapa spesifikasi kelainan seperti fisik, emosional, mental, dan/atau sosial [1]. Selain itu, anak-anak yang juga memiliki potensi kecerdasan serta bakat istimewa digolongkan pada ABK juga. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2018 bahwa penyandang disabilitas umur 18-59 di Indonesia sebesar 22,0 % dari seluruh jumlah penduduk. Jawa Barat berada pada 16 besar dari 34 Provinsi berpenduduk disabilitas di Indonesia [2].

Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi masa depan. Sebab melalui pendidikan manusia mampu mencitrakan diri dan melakukan transformasi, baik dari aspek tindakan maupun cara hidup. Selain itu, manusia akan mampu melakukan adaptasi serta memposisikan diri dengan berperan dalam kehidupan. Lebih jauh lagi pendidikan akan dapat menuntun masyarakat melakukan interaksi pada skala global untuk menjawab tantangan dunia yang kian kompleks. Terutama dalam menghadapi era *society* 5.0 yang membutuhkan pembinaan SDM berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan berkualitas [3]. Sayangnya tingkat pendidikan yang ditempuh penduduk disabilitas Indonesia Tahun 2018 menunjukkan semakin tinggi jenjang

pendidikan justru semakin rendah keikutsertaan penduduk disabilitas dalam pendidikan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2018 diperoleh data prosentase penduduk disabilitas yang menempuh pendidikan sebagai berikut: a) Tidak bersekolah (30,7%); b) Tidak Tamat SD/MI (28,2%); c) Tamat SD/MI (24,0%); d) Tamat SLTP/MTs (21,2%); e) Tamat SLTA/MA (19,7%); f) Tamat Diploma/PT (17,6%).

Prosentase bidang pekerjaan yang dijalankan oleh penduduk disabilitas Indonesia pada tahun 2018 berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI cukup besar, ada pada kondisi tidak bekerja sebesar 26,7%. Sedangkan keterserapan pada sektor formal berada pada angka dibawah 30%. Hal ini menunjukkan masih cukup besar ketergantungan penduduk disabilitas. Sehubungan dengan itu diperlukan upaya untuk mendorong kemandirian penduduk disabilitas salah satunya melalui pembekalan *life skill* dengan pendidikan vokasional. Pada jenjang formal lembaga yang memungkinkan memberikan pembinaan vokasional adalah Sekolah Menengah Kejuruan. Maka dari itu perlu dilakukan kajian bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusi di SMK sehingga dapat ditemukan pola untuk mengoptimalkan keterampilan sesuai minat dan bakat guna menumbuhkan karakter kemandirian.

Penelitian terdahulu mengenai pelaksanaan pengembangan bakat siswa dengan gangguan penglihatan di SMK yang menyelenggarakan

pendidikan inklusif dapat terlaksana dengan optimal hingga menghantarkan siswa ABK tersebut menjadi juara tingkat nasional [4]. Sedangkan kajian mengenai implementasi pendidikan inklusi di SMK lebih banyak menggambarkan penyelenggaraan secara umum dan jarang mendeskripsikan bagaimana bimbingan terprogram yang dilaksanakan khusus untuk memperdalam kompetensi kejurumannya [5]. Sekolah yang telah melaksanakan program inklusi lebih dari delapan tahun kemungkinan besar telah memiliki sistem pengembangan kurikulum yang terprogram untuk siswa inklusi [6]. Penelitian yang dilakukan ini berupa analisis keterlaksanaan komponen pendidikan sebagai pranata sosial untuk mencapai tujuan “memanusiakan manusia”.

SMK Pariwisata Islam Terpadu Nurul Imam merupakan salah satu SMK di Kabupaten Bandung Barat yang menyelenggarakan program sekolah inklusi. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Sekolah sebagai Partisipan I didapatkan informasi bahwa SMK ini merupakan salah satu SMK Pariwisata dengan jumlah inklusi terbanyak di Kabupaten Bandung Barat. Pada awal pendiriannya, SMK ini belum memprogramkan penyelenggaraan sekolah inklusi, tetapi karena adanya pendaftar yang berkebutuhan khusus, maka diputuskanlah untuk menerima siswa ABK. Prinsip *zero reject* berlaku terlepas dari sifat atau keparahan disabilitas. Persyaratan hukum ini didasarkan pada proposisi bahwa semua anak disabilitas dapat belajar dan mendapat manfaat dari pendidikan yang sesuai dan sekolah tidak memiliki hak untuk menolak akses anak mana pun untuk mendapat kesempatan pendidikan yang setara [7].

Maka dari itu menarik untuk dikaji bagaimana keterlaksanaan pendidikan sebagai pranata sosial berdasarkan komponennya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan komponen pranata berupa tata kelakuan, fungsi sosial, aktor, perilaku berpola, dan sarana dan prasarana yang mendukung di SMK Pariwisata IT Nurul Imam sebagai salah satu sekolah inklusi. Sebagai sekolah inklusi yang telah berjalan empat tahun, sekolah ini diharapkan dapat melaksanakan komponen pranata pendidikan secara optimal agar tujuan pendidikan tercapai.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pendidikan Sebagai Pranata Sosial

Pendidikan sebagai sebuah pranata memiliki komponen yang secara sistemik, serempak, bersama-sama dan saling mengukung mewujudkan upaya pemenuhan fungsi dan kebutuhan sosial yang sangat penting yaitu untuk memanusiakan manusia serta mencerdaskan kehidupan bangsa [8] dengan komponen sebagai berikut:

- a. Tata kelakuan yang merupakan landasan normatif dan aturan-aturan mengenai penyelenggaraan pendidikan. Sumber tersebut terdiri dari sumber tertulis baik berupa undang-undang atau peraturan dari lingkup nasional maupun lokal satuan pendidikan.
- b. Fungsi pranata tersebut memenuhi kebutuhan atau fungsi sosial paling penting bagi masyarakat. Hakikatnya pendidikan merupakan sebuah jembatan yang diharapkan mampu menghantarkan, membina, dan mengembangkan karakter positif sehingga pendidikan dapat mencapai tujuan “memanusiakan manusia”.
- c. Orang-orang yang punya keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pendidikan diantaranya: 1) pejabat pemerintah/pimpinan organisasi lembaga swasta (yayasan/pemegang kebijakan), 2) pejabat-pejabat yang mengatur pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam berbagai jenjang, 3) tenaga pendidik yang melaksanakan pendidikan, 4) tenaga kependidikan yang membantu pelaksanaan pendidikan, 5) siswa yang merupakan subjek pendidikan.
- d. Perilaku berpola dari orang-orang yang punya keterlibatan dalam sistem pendidikan. Perilaku ini disebut memiliki pola maka memiliki makna bahwa setiap perilaku memiliki keteraturan susunan serta pengulangan-pengulangan teratur pada pelaksanaannya sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
- e. Sarana prasarana pada setiap jalur pendidikan memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri. Selain sarana dan prasarana yang benar-benar menjadi kebutuhan satuan pendidikan, ada juga yang hanya sebagai simbol saja.

Pada penelitian ini akan dianalisis bagaimana keterlaksanaan masing-masing komponen ini berlangsung di sekolah sehingga dapat dinilai optimalisasinya.

### 2.2 Pendidikan Inklusif

Siswa disabilitas berhak mendapatkan pendidikan khusus karena atribut fisik atau perilakunya yang mengalami gangguan atau hambatan tertentu [7]. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama dengan menyediakan program pendidikan yang layak, bermutu, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil [9].

Konsep dasar yang terkait dengan pendidikan inklusif mengenai anak adalah bahwa semua anak berhak memperoleh pendidikan; semua anak dapat belajar, dan siapapun dapat mengalami kesulitan dalam belajar; semua anak membutuhkan dukungan untuk belajar; dan pengajaran yang terfokus pada

anak bermanfaat bagi semua anak. Kedua adalah konsep tentang sistem pendidikan dan persekolahan, bahwa a) pendidikan lebih luas dari pada persekolahan formal; b) sistem pendidikan yang fleksibel dan responsif; c) lingkungan pendidikan yang memupuk kemampuan dan ramah; d) Peningkatan mutu sekolah yang efektif; dan e) pendekatan sekolah yang menyeluruh dan kolaborasi antarmitra. Ketiga adalah konsep tentang keberagaman dan diskriminasi terdiri dari a) memberantas diskriminasi dan tekanan untuk mempraktekkan eksklusif; b) merespon keberagaman sebagai sumber kekuatan, bukan masalah; c) pendidikan inklusi mempersiapkan siswa untuk masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan.

Tujuan dari sistem sekolah umum lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan setiap anak. Meskipun ini penting, itu tidak boleh terjadi dengan mengorbankan peran sekolah dalam menyediakan jalur menuju komunitas demokratis dan perbaikan warga negara - semua, bukan hanya beberapa. Tantangan kita adalah, tentu saja, untuk menguji retorika dan praktik-praktik dalam pendidikan dengan tujuan mencapai keseimbangan yang lebih baik antara memenuhi kebutuhan unik dan membangun komunitas.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi fenomenologi yang meniscayakan diuraikannya fenomena dalam situasi alami dengan sejernih-jernihnya [10]. Peneliti terlibat langsung dalam penelitian sehingga dapat mengungkapkan pengalaman subjek secara holistik untuk mengkonstruksi pola dan relasi makna. Fenomenologi dalam sosiologi fokus pada upaya aktor dalam menginterpretasikan dunia sosialnya melalui pembentukan *sense-data* dalam tipikasi atau penggambaran mental [10]. Teknik penentuan partisipan menggunakan *purposive sampling* dengan kriterianya adalah pihak struktural maupun nonstruktural sekolah yang terlibat langsung dalam pengelolaan sekolah inklusi. Partisipan yang dilibatkan terdiri dari: a) Kepala Sekolah (Partisipan 1) untuk mengetahui kebijakan umum mengenai penyelenggaraan sekolah inklusi, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Kesiswaan (Partisipan 2 & 3) untuk menggali program khusus inklusi berdasarkan masing-masing bidang, dan Guru Pendamping Khusus (GPK) (Partisipan 4, 5, 6, & 7) untuk mengkaji program pendampingan dan keterlaksanaan pendidikan inklusi di sekolah ini. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara semi terstruktur yang dilengkapi dengan observasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai Desember 2019.

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan mentranskripsi data, mengklasifikasi data berdasarkan tema dan sub tema, kemudian melakukan reduksi dan eliminasi data, penamaan data sesuai pokok masalah penelitian, dan pencocokan dengan masalah penelitian [10]. Selanjutnya dilakukan deskripsi tekstural berdasarkan informasi dari partisipan untuk kemudian dilakukan deskripsi struktural dan akhirnya disusun sintesa data dan menjawab masalah penelitian dengan merekonstruksi makna dan esensi fenomena. Validasi data dilakukan dengan a) peneliti melakukan refleksi terhadap makna yang ditangkap dari fenomena yang telah disintesa; b) mengkonfirmasi kepada partisipan dan pembimbing untuk memperoleh kemandirian bahwa makna-makna yang dikonstruksi oleh peneliti sudah benar; dan c) analisis rasional dengan menelaah deskripsi fenomenologis dari makna-makna intersubjektif secara keseluruhan dan menilai kelogisannya [10].

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Landasan Normatif Pendidikan Inklusi**

Tata kelakuan sebagai komponen pertama dalam penyelenggaraan sekolah inklusi di SMK ini didasarkan pada peraturan tertulis terutama bersumber dari peraturan negara. Salah satu landasannya adalah Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa [11]. Pemerintah sangat mendukung pendidikan inklusif. Bahkan saat ini peraturan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mengharuskan sekolah manapun memberi porsi untuk siswa ABK apabila ada yang mendaftar.

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP, SMA, SMK menegaskan mengenai layanan inklusif. Siswa ABK memiliki kesempatan sama dengan siswa umum untuk mendapatkan layanan pendidikan dan beradaptasi secara sosial [7]. Selain itu, nilai Islam yang ditekankan menjadi landasan konsep pelaksanaan sekolah ini semakin memperkuat pertimbangan untuk melaksanakan sekolah inklusi. Jenis sekolah inklusi ini mengusung konsep Sekolah Islam Terpadu yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam proses pembelajaran baik kurikuler maupun *co*-kurikuler. Maka dari komponen tata kelakuan, sekolah ini memiliki landasan yang kuat terutama dari sumber tertulis.

## 4.2 Fungsi Sosial

Fungsi sosial sebagai komponen kedua mengejawantahkan tujuan pendidikan secara umum. Berdasarkan referensi [8] bahwa fungsi pendidikan di Indonesia tertulis dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi,

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

### 4.2.1 Visi dan Misi sebagai Kerangka Fungsi Sosial dalam Pranata Pendidikan

Fungsi sosial yang dilaksanakan di sekolah inklusi ini secara umum berpedoman kepada visi sebagai kerangka atau tujuan dalam pelaksanaan pendidikan. Visi sekolah ini yaitu “menjadikan lembaga pendidikan yang mampu mewujudkan integritas moral yang tinggi, profesionalisme, berdaya saing nasional/internasional” [13] [1]. Visi ini memiliki kesesuaian dengan fungsi pendidikan nasional. Integritas moral yang tinggi mencerminkan pembentukan karakter baik bagi siswa. Profesionalisme dan berdaya saing nasional/internasional menunjukkan bahwa dilaksanakannya upaya untuk mengembangkan potensi siswa dengan optimal sesuai tuntutan zaman.

Visi tersebut dijabarkan dalam uraian misi [13]. Pada aspek pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa terjabarkan dalam misi pertama yang berbunyi, “Mempersiapkan strategi pendidikan yang islami untuk pembinaan aspek rohaniah, akal dan jasmaniah”. Aspek keilmuan tertuang pada misi kedua yaitu, “Menghasilkan lulusan yang memiliki mental pemenang dalam aspek intelektual, sikap dan profesionalisme di bidangnya sehingga siap menghadapi Dunia Usaha/Dunia Industri”. Keilmuan juga dilengkapi dalam aspek misi keempat yaitu, “Membekali lulusan dengan citra rasa dan keterampilan seni budaya islam dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran”. Sedangkan pembentukan karakter berakhlak mulia tercantum dalam misi ketiga yaitu, “Membangun pembelajaran yang Tertib, Teratur, Terarah, Tekun dan Takwa (5T)”. Misi kelima yaitu, “Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter aktif, kreatif, inovatif, analitis dan mandiri” mengandung unsur cakap, kreatif, dan mandiri berdasarkan fungsi pendidikan nasional. Misi keenam berbunyi, “Menjalinkan kerjasama dengan pihak pemerintah,

instansi/lembaga swasta, masyarakat, dunia usaha dan industri” menjadi jalan untuk pembentukan siswa sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Upaya tersebut memungkinkan siswa secara langsung berinteraksi dengan dunia usaha dan industri dalam melaksanakan program praktik kerja lapangan (PKL) untuk mempraktikkan keilmuannya secara langsung.

### 4.2.2 Penerimaan Terbuka untuk Siswa ABK

Sekolah memutuskan untuk menjadi sekolah inklusi ketika ada siswa ABK yang mendaftar di tahun awal pendiriannya. Partisipan 1 menyatakan, “Awal mulanya dari sekolah SMK ini terbentuk memang tidak ada keinginan khusus untuk mendirikan sekolah inklusi. Hal ini diawali adanya siswa yang mendaftar di sekolah kami pada tahun pertama. Beranjak dari situlah terpikir untuk siap menyelenggarakan SMK berbasis inklusi” (Partisipan 1). Pernyataan tersebut dikuatkan oleh data penerimaan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Data penerimaan siswa ABK

Tahun Masuk	Pendaftar	Diterima	Ditolak
2016	3 orang	3 orang	0
2017	4 orang	4 orang	0
2018	1 orang	1 orang	0

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa angka penolakan terhadap siswa ABK pada tiga tahun terakhir adalah 0. Referensi [7] menjadi penguat karena menyatakan bahwa sekolah tidak memiliki hak untuk menolak akses (*zero reject*) agar anak dapat belajar dan memperoleh manfaat dari pendidikan publik. Diterimanya siswa ABK di SMK ini menjadi salah satu program yang mendapat perhatian dari *stakeholder* sekolah. Sekolah semakin bertekad untuk tidak membedakan siswa dari berbagai hal.

Salah satu tujuan penyelenggaraan sekolah inklusi ini adalah agar terjadinya interaksi yang harmonis antara siswa ABK dengan siswa umum. Maka sekolah menyelenggarakan program yang diharapkan mampu untuk mengadaptasikan siswa umum dengan siswa ABK. Salah satunya melalui program pembelajaran yang disatukan dan berkelompok sehingga diharapkan dapat terbangun sinergi dan keharmonisan dalam interaksi. Selain itu diberikan juga pemahaman melalui Guru BK, Wakasek Bidang Kesiswaan, Guru Pembimbing Khusus (GPK), dan juga orangtua siswa agar siswa umum dapat menerima dan berinteraksi dengan baik dengan siswa ABK. Keberadaan siswa ABK seharusnya menjadi salah satu sarana menumbuhkan karakter positif terutama empati terhadap sesama. Sekolah inklusi diharapkan juga dapat memfasilitasi siswa ABK agar dapat beradaptasi secara normal dan berkembang optimal [12].

#### 4.2.3 Assessment Kemampuan Siswa ABK

Sebelum diikutkan dalam proses pembelajaran, siswa ABK menjalani program *assessment* terlebih dahulu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penilaian terhadap kebutuhan dari siswa inklusi sehingga terpetakan kemampuannya untuk kemudian disesuaikan bentuk pelayanan pendidikan yang akan diberikan. Partisipan 7 memberikan keterangan bahwa, “*untuk siswa ABK, sebenarnya mereka sebelum belajar kita assessment dulu kebutuhannya ditingkat mana. Sesudah diketahui, baru pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah*” (Partisipan 7). *Assessment* awal umumnya dilakukan pada saat masuk atau pada program Penerimaan Peserta Didik Baru. Tetapi lamanya waktu yang dibutuhkan disesuaikan dengan tingkat kekhususan, ada yang cepat dan ada yang lambat.

#### 4.2.4 Program Umum untuk Siswa ABK

Berdasarkan hasil kajian, program untuk siswa ABK berdasarkan aspek dibagi menjadi: a) Program Akademik, b) Program Psikomotor, c) Program Bina Diri (Sikap kemandirian). Pada program akademik, pelaksanaan tujuan pembelajaran dan standar kompetensi lulusan disesuaikan dengan kategori kekhususan siswa. Hal ini dipertimbangkan berdasarkan hasil *assessment*. Berdasarkan wawancara terhadap bagian kurikulum diperoleh informasi bahwa untuk siswa dengan kategori kekhususan termasuk ringan dibebankan pembelajaran sebesar 80%-100% dari standar kompetensi yang diajarkan. Untuk siswa dengan kategori kekhususan sedang, ditargetkan sekitar 60%. Untuk kategori berat, dibebankan sekitar 50% atau bahkan 30%.

Penyesuaian terhadap program pembelajaran pada sekolah ini menggunakan konsep lima bentuk kurikulum. *Pertama* yaitu konsep duplikasi dengan meniru sesuai atau mendekati aslinya. *Kedua* modifikasi dengan menduplikasi sesuatu disertai merubah beberapa hal yang disesuaikan dengan kemampuan anak. *Ketiga* substitusi yaitu penggantian mata pelajaran atau kompetensi dasar. *Keempat* yaitu omisi, jadi ketika Kompetensi Dasarnya mustahil untuk dicapai siswa ABK, maka dilakukan penghapusan. *Kelima* yaitu pengayaan atau memperdalam juga memperluas materi tertentu. Program pembelajaran berdasarkan subjeknya dibagi lagi menjadi a) program umum dan b) program individual. Partisipan 5 menyatakan bahwa, “*tambahan materi yang berkaitan dengan kemandirian, keagamaan, olahraga*” (Partisipan 5). Masing-masing program dirancang dengan waktu yang disusun GPK berdasarkan konfirmasi kepada guru mata pelajaran. Sebagaimana disampaikan oleh Partisipan 5, “*misalkan di mata pelajaran lain ada 3*

*jam pelajaran, nah kita ambil satu jam pelajarannya itu untuk program khusus ABK ditempat khusus*” (Partisipan 5). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, teridentifikasi kemampuan siswa ABK dan pendampingannya berikut ini:

Tabel 2. Potensi dan pendampingan khusus siswa ABK

ABK	Potensi	Pendampingan
ABK 1	Bermain Piano.	Difasilitasi kursus privat piano di rumah oleh orang tua.
ABK 2	Bernyanyi, menari.	Diberikan kesempatan untuk tampil.
ABK 3	Menyimak dan ketertarikan pada pesawat.	Diperbanyak bacaan atau video mengenai pesawat. Orang Tua mengajak anak melihat pesawat.
ABK 4	Ketertarikan pada otomotif.	GPK berinisiatif memberikan bimbingan mengenai otomotif.
ABK 5	Cakap Bahasa Inggris, gambar.	Diberikan kesempatan berpidato Bahasa Inggris pada kegiatan sekolah.
ABK 6	Daya tangkap unggul & berjiwa pemimpin.	Diberikan latihan intensif program tata boga. Diberikan kesempatan menjadi muadzin dan imam.
ABK 7	Pemahaman Al-Qur'an, pengetahuan dasar tata boga.	Diberikan pendampingan untuk memperbanyak hafalan dan pemahaman setiap hari sebelum KBM.
ABK 8	Desain Grafis.	Diberikan pendampingan membuat animasi/games digital.

Partisipan 4 menyatakan bahwa pelaksanaan kelas khusus dilaksanakan dua kali dalam satu minggu. Konten dalam program khusus biasanya adalah berupa pemantapan materi mata pelajaran tertentu, bina diri, pengembangan potensi dan praktik kejuruan. Sedangkan program umum untuk siswa ABK diantaranya adalah program Tahfidz sebagai program unggulan sekolah dan mata pelajaran umum agar siswa ABK dapat tetap mengikuti program pembelajaran umum namun disesuaikan dengan kemampuannya.

#### 4.2.5 Pendampingan Keterampilan Kejuruan

Sekolah ini membuka kesempatan dan memfasilitasi ABK untuk mengembangkan diri di bidang kuliner dan dilatih juga kemandiriannya. Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa ABK dibekali kemandirian dengan latihan wirausaha dengan membuat produk sendiri, pengemasan, dan pemasaran melalui media yang disediakan oleh sekolah. Tempat produksi difasilitasi melalui Laboratorium Tata Boga. Untuk pemasaran difasilitasi melalui Kantin sekolah.

Keahlian memasak siswa ABK berdasarkan penilaian GPK telah mencapai 60% sehingga memerlukan pendampingan khusus agar dapat mencapai kompetensi minimal. Sedangkan dalam kemandirian menjaga kebersihan sudah muncul sekitar 70%. Untuk membimbing keterampilan kejuruan agar dapat mencapai kompetensi minimal dilaksanakan bimbingan khusus setiap hari

Kamis. Praktik ini didampingi langsung oleh GPK dan Chef profesional yang menjadi praktisi dan diundang sebagai guru tamu.

SMK ini mengikutsertakan siswanya dalam ujian kompetensi untuk pembuktian bahwa siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kejuruannya. Jika lulus dalam ujian ini, maka siswa dapat diakui kompetensinya untuk meneruskan bekerja dibidang yang sesuai dengan kejuruannya. Siswa ABK pun diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian kompetensi. Sehubungan dengan kekhususan yang dimilikinya, maka siswa ABK diberikan pelatihan khusus bahkan dari semenjak kelas XI (sebelas) meskipun ujian dilaksanakan di kelas XII (dua belas).

Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dan bekerjasama dengan orangtua, hasil dari pelaksanaan uji kompetensi berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Pencapaian prestasi yang tidak terduga adalah salah satu siswa ABK pada Tahun Ajaran 2018-2019 lulus dan dinyatakan kompeten pada ujian kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

#### **4.3 Aktor yang Berperan pada Sekolah Inklusi**

Proses penyelenggaraan sekolah inklusi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak atau *stake holder*. Sehubungan dengan itu, Partisipan 1 mengidentifikasi aktor yang terlibat dan berpengaruh pada proses keberjalanan sekolah inklusi. Pertama adalah pimpinan Yayasan yang menaungi SMK ini. Pimpinan Yayasan diinstitusi ini berperan sebagai pemegang kewenangan tertinggi. Dukungan yayasan diberikan baik moril maupun materil. Kemudian struktural pimpinan sekolah terutama Kepala Sekolah memiliki peran untuk mengajukan rancangan konsep kepada pimpinan yaitu Yayasan dan memberikan arahan teknis atas kebijakan pimpinan juga melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan tim struktural baik wakil kepala sekolah maupun staf.

Aktor lainnya adalah siswa yang merupakan subjek dalam pendidikan baik siswa ABK maupun siswa umum. Berikutnya adalah GPK (GPK) yang berperan mendampingi siswa ABK dalam proses pembelajaran. Guru mata pelajaran juga menjadi pihak yang berpengaruh, karena tujuan pembelajaran yang disesuaikan untuk pendidikan inklusi harus dirancang sedemikian rupa sesuai dengan tingkat kebutuhan khusus masing-masing siswa inklusi. Guru keahlian pada sekolah kejuruan juga harus betul-betul mampu mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan dari siswa ABK agar proses pengembangan minat dan bakatnya optimal. Guru

menjadi aktor yang cukup berperan dalam proses pendidikan inklusi karena menjembatani kebutuhan yang heterogen dalam satu kelas agar semua dapat terakomodir. Salah satu upaya agar pendidikan inklusi dapat berjalan optimal adalah dengan meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara pendidik khusus dan reguler [7].

Orangtua juga sangat berpengaruh, karena proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah harus beriringan dan sejalan dengan di rumah untuk menunjang keberhasilan sekolah inklusi. Pada sekolah ini telah disediakan GPK untuk membantu proses pembelajaran siswa ABK. Selain itu GPK juga memiliki tugas mengawal perkembangan dan pencapaian siswa ABK melalui rancangan program yang sistematis dan terukur ketercapaiannya.

Referensi [7] menuturkan bahwa partisipasi dari orangtua dan siswa secara aktif dalam proses pendidikan inklusi memberikan manfaat yang cukup signifikan. Orang tua bukan saja memiliki hak keterlibatan pada proses pendidikan anak mereka, melainkan juga dapat memberikan bantuan secara profesional untuk menyeleksi tujuan pengajaran yang tepat dan optimal. Selain itu juga orang tua diharapkan dapat memberikan informasi yang membantu guru agar lebih efektif pada proses peningkatan dan pengembangan minat dan bakat anak-anak mereka.

#### **4.4 Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Meskipun saat ini sudah mulai dilakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang, hanya saja dirasakan oleh pihak sekolah masih belum optimal. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan pendokumentasian karya siswa ABK. Partisipan 1 menyatakan,

*“Faktor penghambat lainnya adalah ketersediaan sarana, alat peraga, buku penunjang dan ruang khusus. Ada ruangan tersendiri, tapi belum didisain untuk perkembangan anak-anak. Sehingga hasil karyanya tidak terdokumentasikan dengan baik”* (Partisipan 1).

Kondisi bangunan yang masih belum memadai menjadi salah satu faktor penghambat karena dikhawatirkan dengan kondisi siswa ABK yang terkadang masih belum bisa diawasi dengan maksimal akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ruang yang dimaksud untuk pembelajaran inklusi yang khusus masih bergabung dengan ruangan lainnya sebagaimana tercantum pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Ruang yang digunakan pembelajaran siswa ABK

Ruangan	Fungsi	Keeterangan
Kelas	Pembelajaran	Bersatu dengan siswa umum. (Sesuai)
Kelas Khusus	Pembelajaran Khusus ABK	Menggunakan ruang perpustakaan. (Tidak sesuai, kurang kondusif).
Tahfidz	Pelaksanaan Program Tahfidz	Menggunakan ruang BK. (Tidak sesuai, kurang kondusif).

## 5. KESIMPULAN

Pendidikan sebagai salah satu bentuk pranata sosial memiliki komponen yang saling berkaitan berupa tata kelakuan, fungsi sosial, aktor, perilaku berpola (peran), dan sarana dan prasarana [8]. Berdasarkan hasil kajian, di sekolah inklusi ini teridentifikasi keterlaksanaan komponen pendidikan tersebut. Komponen tata kelakuan terlaksana dengan didasarkan kepada sumber norma tertulis dari peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan sekolah inklusi dan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar program. Sedangkan sumber norma tidak tertulis diwujudkan berdasarkan rasa kemanusiaan untuk tidak mendiskriminasi. Komponen lainnya adalah fungsi sosial yang juga terlaksana melalui visi dan misi serta dijabarkan dalam bentuk program. Fungsi sosial juga tercermin dalam penerimaan terbuka untuk siswa ABK, yang diarahkan bentuk fasilitasnya melalui upaya identifikasi kebutuhan siswa ABK untuk kemudian dijabarkan dalam proses pembelajaran baik secara umum yang bergabung dengan siswa umum maupun program khusus dengan target pencapaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kemampuan siswa berdasarkan hasil analisa kekhususan.

Komponen aktor dan perannya terdiri dari a) Pimpinan Yayasan sebagai pemegang kebijakan tertinggi; b) Kepala Sekolah yang berperan sebagai perancang, pengawas, pemantauan, dan evaluator program; c) Wakil Kepala Sekolah dan staf menjadi pelaksana program; d) siswa yang menjadi subjek dalam pembelajaran; e) GPK bertugas mendampingi siswa ABK dalam pembelajaran umum maupun khusus; f) Guru mata pelajaran memberikan pelajaran umum sesuai kemampuan siswa; g) orangtua siswa membantu memahami dan bekerjasama dalam optimalisasi pencapaian pembelajaran. Optimalisasi pembinaan terutama bagi GPK dan guru mata pelajaran umum diperlukan agar dapat mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi. Ketersediaan tim ahli khusus inklusi sebaiknya dipenuhi, setidaknya secara insidental. Dibutuhkan juga program yang menjembatani interaksi positif antara siswa umum dan siswa ABK supaya dapat saling menerima dan menghargai. Selain itu juga dibutuhkan peraturan khusus agar perilaku negatif terhadap siswa ABK dapat terantisipasi. Berdasarkan hasil kajian, komponen

sarana prasarana pada sekolah ini masih belum optimal dan perlu dilakukan upaya pemenuhan fasilitas secara bertahap. Sekolah diharapkan dapat berkoordinasi dengan dinas pendidikan terutama penggiat pendidikan inklusi agar mendapatkan pembinaan dan dukungan penyelenggaraan sekolah inklusi sesuai standar.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Yayasan Harpa Nur Imam, SMK Pariwisata IT Nurul Imam, dan panitia IRWNS 2020 sehingga makalah ini dapat diselesaikan. Semoga kebaikan semua pihak yang berkontribusi dibalas dengan balasan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional", 2003. [Online]. Tersedia: [https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU\\_no\\_20\\_th\\_2003.pdf](https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf). [Diakses tanggal 20 Februari 2019].
- [2] Kementerian Kesehatan RI, "INFODATIN: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI", 2019. [Online]. Tersedia: <https://www.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-disabilitas.pdf>. [Diakses tanggal 30 Juni 2020].
- [3] F. E. Nastiti and A. R. N. 'Abdu, "Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi Era Society 5.0," *Edcomtech: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, vol. 5, no. 1, pp. 61-66, 2020.
- [4] S. N. Sabrina, "Pelaksanaan Pengembangan Bakat Siswa Dengan Gangguan Penglihatan di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif SMKN 7 Padang," *JUPEKhu (Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus)*, vol. 4, no. 3, pp. 522-533, 2015.
- [5] P. S. Sari, "Implementasi Pendidikan Inkusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SMK Negeri 8 Surakarta", 2019. *Skripsi*, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [6] A. A. Sopandi, "Pengembangan Kurikulum Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di SMK Negeri 4 Padang dalam Seting Pendidikan Inklusif", *PEDAGOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. XIII, no. 1, pp. 1-9, 2013.
- [7] J. A. Banks and C. A. M. Banks, *Multicultural Education: Issues and Perspectives*, Ed. 7<sup>th</sup>. United States of America, WILEY (Jhon Wiley & Sons), 2010.
- [8] S. Adiwikarta, 2016, *Sosiologi Pendidikan: Analisis Sosiologi Tentang Praksis Pendidikan*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- [9] Nur'aeni, *Buku Ajar Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Purwokerto, UM Purwokerto Press, 2017.
- [10] A. Main, *Fenomenologi Sebagai Filsafat dan Metode Dalam Penelitian Sosiologi*. Jakarta, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018.
- [11] Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia,

*Prosiding The 11<sup>th</sup> Industrial Research Workshop and National Seminar  
Bandung, 26-27 Agustus 2020*

“Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Siswa yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa”, 2009. [Online]. Tersedia: <https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Permen-No.-70-2009-tentang-pendidikan-inklusif-memiliki-kelainan-kecerdasan.pdf>. [Diakses tanggal 20 Februari 2019].

- [12] D. Budimansyah, *Perancangan Pembelajaran Berbasis Karakter: Seri Pembinaan Profesionalisme Guru (Edisi Revisi)*. Bandung, Widya Aksara Press, 2018.
- [13] Sekolah Islam Terpadu Nurul Imam, "Sekolah Islam Terpadu Nurul Imam Yayasan Harpa Nur Imam," [Online]. Tersedia: <http://sitnurulimam.simplesite.com/424106064>. [Diakses tanggal 04 July 2020].